

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sekarang ini, pertumbuhan teknologi telah menjadi suatu hal yang biasa. Perkembangan teknologi yang terus merambah dan masuk ke dalam kehidupan masyarakat, menawarkan banyak kemudahan. Kehadiran teknologi informasi sangat diperlukan untuk mendukung operasional bisnis. Teknologi informasi (TI) telah mengubah aktivitas di semua sektor dan TI memainkan peran kunci di banyak sektor (Leon A. Abdillah, 2011). Salah satu bidang yang terpengaruh akan perkembangan teknologi adalah bidang keuangan. Perkembangannya yang cukup pesat, perlahan mengubah industri keuangan dari bentuk tradisional ke bentuk digital. Kombinasi antara teknologi dan keuangan disebut sebagai *financial technology* atau lebih dikenal dengan fintech. Diharapkan melalui kehadiran fintech bisa meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Fintech membantu berbagai jenis bisnis mencapai kemudahan dan efisiensi di sektor keuangan. Sehubungan dengan pesatnya perkembangan inovasi produk keuangan digital yang memprioritaskan perlindungan konsumen yang baik dan bertanggung jawab, maka OJK menerbitkan suatu peraturan yang tertuang dalam POJK Nomor 13/POJK.02/2018 mengenai Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa keuangan.

Menurut Crismastioanto (2017) fintech didefinisikan sebagai inovasi pada bidang keuangan yang berkaitan dengan teknologi modern. Menurut Bank Indonesia, pemanfaatan teknologi dalam sistem keuangan untuk menciptakan produk, layanan, teknologi, dan model bisnis baru yang bisa mempengaruhi stabilitas ekonomi moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan dalam sistem pembayaran merupakan arti dari fintech. Menurut *National Digital Research Center (NDRC)*, *financial technology* ialah terobosan dalam jasa keuangan, istilah fintech terdiri dari dua kata yakni “*financial*” dan “*technology*” (fintech), yang mengarah pada pembaruan keuangan dengan menggunakan teknologi modern. Penerapan *financial technology* diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam kegiatan operasional dan meningkatkan kualitas layana. Perkembangan fintech telah

menyediakan banyak alat atau aplikasi inovatif untuk keuangan seperti: aplikasi pembayaran, pinjaman, kredit dan lain-lain. Keberadaan fintech ditandai dengan munculnya berbagai layanan keuangan digital untuk memberikan berbagai solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi pelaku usaha seperti permodalan dan keuangan. Peran fintech dalam sistem pembayaran menurut Bank Indonesia (2018) adalah menyediakan pasar bagi pelaku usaha, menjadi alat bantu untuk pembayaran, penyelesaian / *settlement* dan kliring, membantu pelaksanaan investasi yang lebih efisien, mitigasi resiko dari sistem pembayaran yang konvensional, dan membantu pihak yang membutuhkan untuk menabung, meminjam dana, dan penyertaan modal. Muzdalifa et al., (2018) dalam penelitiannya juga menyebutkan bahwa fintech memiliki peran penting dalam mengubah perilaku dan ekspektasi konsumen diantaranya yaitu dapat mengakses data dan informasi kapan saja dan dimana saja. Fintech juga dapat menyamaratakan bisnis besar dan kecil sehingga cenderung untuk memiliki ekspektasi tinggi meski terhadap bisnis kecil yang baru dibangun.

Menurut *World Bank*, salah satu faktor penting dalam mengurangi angka kemiskinan serta guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat ialah inklusi keuangan yang merupakan salah satu contoh program yang bertujuan untuk memperluas akses keuangan di Indonesia dan dapat memberikan pemecahan masalah atas berbagai faktor penyebab rendahnya literasi keuangan. OJK menyampaikan hasil SNLIK (Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan) yaitu tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68% dan inklusi keuangan sebesar 85,1% pada tahun 2022.

Peningkatan pemahaman dan pemanfaatan produk dan/atau jasa keuangan oleh masyarakat dapat mendorong pemerintah untuk mencapai tujuan inklusi keuangan. Urgensi penelitian ini adalah target dari Strategi Nasional Keuangan Inklusi (SNKI) pada tahun 2024 untuk dapat meningkatkan indeks inklusi keuangan menjadi 90%. Meningkatnya inklusi keuangan di Indonesia menjadi sebuah harapan bagi berbagai pihak. Masyarakat dapat lebih cepat dan mudah dalam mengakses layanan keuangan sesuai dengan Perpres No.114 Tahun 2020 mengenai Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Target yang diinginkan

dari tingkat inklusi keuangan yaitu sebesar 89% untuk tahun 2023 dan target harapan sebesar 90% untuk tahun 2024.

Fintech merupakan salah satu prinsip keuangan inklusif yaitu inovasi yang berarti mendorong pembaruan teknologi dan kelembagaan sebagai alat dalam memperluas akses dan pemanfaatan sistem keuangan. Masyarakat dengan penghasilan rendah dan pelaku UMK yang merupakan kelompok masyarakat yang masih belum terpenuhi oleh layanan keuangan formal menjadi fokus dari inklusi keuangan.

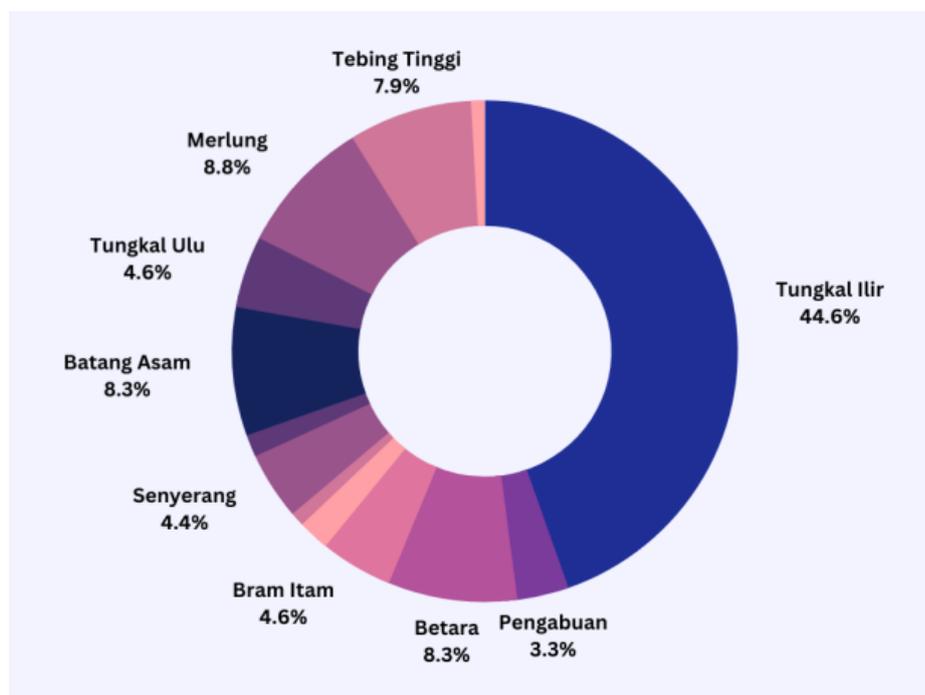
*CFI* atau *Center for Financial Inclusion* mengartikan inklusi keuangan sebagai akses kepada produk atau jasa keuangan seperti peminjaman, simpanan, asuransi, dan pembayaran, sembari memberikan akses berkualitas serta kenyamanan, keterjangkauan, kelayakan konsumen, dan ketersediaan. Disasarkan dari data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (2022), peran UMKM dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat besar yaitu mencapai 99% dari seluruh unit usaha. Kontribusi UMKM dalam Produk Nasional Bruto juga mencapai angka 60,5% dan sebanyak 96,9% tenaga kerja terserap dari jumlah keseluruhan penyerapan tenaga kerja nasional.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), penyaluran pinjaman UMKM meningkat 1,36% ke angka Rp1,23 triliun pada Februari 2022 dibandingkan bulan sebelumnya. Dibandingkan posisi Februari 2021, posisi kredit UMKM memang meningkat 14,23%. Dari nilai kredit UMKM, porsi penyaluran terbesar adalah pada sektor grosir, retail, reparasi mobil dan motor, yaitu sebesar Rp 607,83 triliun pada Februari 2022. Ini menyumbang hampir setengah dari seluruh kredit (49,22%). Terdapat total 64.19 juta UKM di Indonesia, dengan didominasi oleh UMK yaitu 64.13 juta atau dalam persentase sekitar 99.92% dari total UMKM. Menurut Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), meski kredit usaha UMKM telah membaik, sekitar 46,6 juta atau 71,8% dari seluruh UMKM Indonesia masih kekurangan akses ke permodalan bank atau lembaga keuangan bukan bank.

Kontribusi fintech bisa menjadi alternatif pemecahan masalah untuk para pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang mengalami kendala pada modal

dalam pengembangan usahanya. Apabila dana yang dimiliki usaha mikro kecil dan menengah diolah dengan baik dengan menggunakan bantuan fintech maka bisa membantu memajukan bisnis dan dapat meningkatkan inklusi keuangan.

Dalam ringkasan eksekutif perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Tanjung Jabung Barat, dalam lima tahun terakhir Tanjung Jabung Barat menjadi kabupaten/kota dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) paling tinggi di Provinsi Jambi. Dimana UMKM memiliki kontribusi yang besar terhadap peningkatan PDRB. Kuala Tungkal merupakan ibukota dari Tanjung Jabung Barat. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Tanjung Jabung Barat tahun 2021 terdapat 8,498 usaha mikro dan kecil di Tanjung Jabung Barat didominasi oleh usaha mikro. Dari jumlah tersebut Kuala Tungkal merupakan penyumbang angka usaha mikro dan kecil terbesar di Tanjung Jabung Barat dengan jumlah 3.793 usaha atau sekitar 44,64%.



**Gambar 1.1 Persentase UMKM di Tanjung Jabung Barat**

*Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Tanjung Jabung Barat (data diolah)*

Dari jumlah usaha mikro dan kecil tersebut terdiri dari beberapa bidang usaha yaitu, pertanian, perdagangan, industri dan aneka usaha. Dari data yang didapat pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tanjung Jabung Barat tahun 2021, usaha paling banyak yaitu pada bidang perdagangan dengan jumlah 5.093 usaha, disusul bidang pertanian dengan jumlah 1.674 usaha, bidang industri berjumlah 1.471 usaha, dan bidang aneka usaha berjumlah 260 usaha. Bidang perdagangan terdiri dari jualan gorengan, toko kelontong, jual kerupuk, toko manisan dan lain sebagainya. Bidang pertanian terdiri dari jual beli pinang, kolam ikan, jual beli kelapa, petani cabe, dan sayur mayur. Bidang industri terdiri dari pengrajin batik, anyam tikar, pembuatan kue, jamu tradisional, dan pengelola dendeng jeruju. Serta bidang aneka usaha terdiri dari bengkel motor, *laundry*, jual pulsa, penjahit pakaian, depot air minum, dan masih banyak lagi.

Bersumber dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi tahun 2020, terdapat 8.390 UMKM di Tanjung Jabung Barat namun diantaranya tidak ada satu usahapun yang berkembang menjadi usaha menengah. Oleh karena itu di Kabupaten Tanjung Jabung Barat hanya terdapat usaha mikro dan kecil. Adapun jumlah untuk usaha mikro adalah sebanyak 7.342 usaha dan usaha kecil sebanyak 1.048 usaha pada tahun 2020. Saat pemerintah membuka pendaftaran untuk Bantuan Presiden Produktif (Banpres Produktif) pada tahun 2020. Kadis Koperindag Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyampaikan bahwa bantuan sangat menarik minat para pelaku usaha di Tanjung Jabung Barat, sehingga jumlah pendaftar mencapai sekitar 5.488 usaha. Salah satu syarat pendaftarannya adalah surat keterangan tidak menerima pinjaman atau pendanaan dari perbankan dan Kredit Usaha Rakyat. Oleh karena itu, diketahui bahwasannya para pelaku usaha mikro dan kecil di Tanjung Jabung Barat belum memperoleh permodalan dari lembaga keuangan. Sejalan dengan yang disampaikan oleh Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat bahwa pada rapat Komite IV DPD RI dengan Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2020, beberapa permasalahan yang sering dihadapi pelaku UMKM di Tanjung Jabung Barat adalah terkendala dengan modal dan pemasaran.

Meskipun kehadiran fintech menawarkan berbagai keuntungan seperti kemampuan terhadap akses permodalan yang lebih nyaman dan mudah kepada UMKM, namun mereka tidak dapat memaksimalkan penggunaan fintech jika literasi keuangan masyarakat rendah. Pemilihan terhadap produk atau jasa keuangan dipengaruhi oleh tingkat literasi individu. Literasi keuangan adalah kombinasi dari keterampilan, pengetahuan, sikap individu yang terkait dengan uang, dan pada akhirnya perilaku individu. Baiq Fitri (2021) menjelaskan dalam bukunya bahwa salah satu teori literasi keuangan adalah *Theory of Planned Behavior*, dimana perilaku manusia dipengaruhi oleh beberapa alasan berbeda dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan untuk pelaku UMK yang memiliki keterbatasan literasi keuangan untuk dapat memanfaatkan fintech.

Penelitian Muzdalifa et al., (2018) menunjukkan bahwasannya kemunculan banyak perusahaan yang bergerak di bidang fintech berperan terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Peran fintech tidak hanya terbatas pada pendanaan modal usaha, akan tetapi juga menyentuh beberapa bagian termasuk layanan pembayaran digital dan juga pengelolaan keuangan. Rusdianasari (2018) menyatakan bahwasannya belum maksimalnya peranan fintech dalam mempengaruhi inklusi keuangan dan stabilitas keuangan.

Di sektor keuangan, fintech menawarkan layanan keuangan inovatif melalui teknologi yang terhubung untuk memfasilitasi berbagai pembayaran, seperti tagihan rumah tangga dan investasi (Fahlevi, 2019). Berbagai produk implementasi dari fintech yang menjadi andalan dan dapat memudahkan kegiatan perekonomian masyarakat adalah transaksi digital yang bisa digunakan secara fleksibel.

Dilatar belakangi oleh permasalahan yang dipaparkan tersebut, kehadiran fintech mengharuskan pelaku UMKM yang didominasi usaha mikro dan kecil agar dapat menyesuaikan diri sesuai dengan perkembangan teknologi yang merubah sistem konvensional menjadi digital. Tujuannya adalah agar para pelaku usaha tetap dapat bertahan di zaman yang semakin maju ini. Untuk itu, perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut terhadap topik tersebut. Hal ini menjadi

perhatian bagi peneliti untuk dapat melaksanakan penelitian dengan judul “**Peran Financial Technology terhadap Perkembangan Inklusi Keuangan pada Usaha Miko dan Kecil di Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari pemaparan tersebut di atas, maka peneliti merumusan masalah dalam penelitian yaitu :

1. Apakah peran *peer to peer lending service* mempengaruhi perkembangan inklusi keuangan usaha mikro dan kecil di Kuala Tungkal?
2. Apakah peran *microfinancing* berpengaruh terhadap perkembangan inklusi keuangan usaha mikro dan kecil di Kuala Tungkal?
3. Apakah peran *digital payment system* berpengaruh terhadap perkembangan inklusi keuangan usaha mikro dan kecil di Kuala Tungkal?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian berdasarkan dari penjelasan latar belakang dan rumusan masalah tersebut yaitu :

1. Untuk menganalisis peran *peer to peer lending service* terhadap peningkatkan perkembangan inklusi keuangan usaha mikro dan kecil di Kuala Tungkal.
2. Untuk menganalisis peran *microfinancing* terhadap peningkatkan perkembangan inklusi keuangan usaha mikro dan kecil di Kuala Tungkal.
3. Untuk menganalisis peran *digital payment system* terhadap peningkatkan perkembangan inklusi keuangan usaha mikro dan kecil di Kuala Tungkal.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Diharapkan adanya riset ini dapat memberikan kontribusi dalam mengetahui peran fintech untuk meningkatkan perkembangan inklusi keuangan usaha mikro dan kecil di Kuala Tungkal.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

a. Bagi Peneliti

Sebagai suatu kontribusi, memperoleh informasi dan pengetahuan sehingga dapat meningkatkan pemahaman atas kehadiran fintech dan pengaruhnya terhadap inklusi keuangan usaha mikro dan kecil di Kuala Tungkal.

b. Bagi Usaha Mikro dan Kecil

Untuk bahan pertimbangan yang dapat membantu usaha mikro dan kecil membuat keputusan tentang penerapan fintech dan mengetahui apakah penerapan fintech dapat berpengaruh pada peningkatan penghasilan dan keuntungan bersih usaha mikro dan kecil.

c. Bagi Pemerintah

Untuk bahan pertimbangan dalam penerapan praktik penggunaan fintech guna meluaskan inklusi keuangan di Indonesia.

d. Bagi Universitas

Sebagai saran bagi perguruan tinggi pada umumnya dan bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Keuangan pada khususnya tentang peran fintech dalam pengembangan inklusi keuangan.